

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas Di Wilayah Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa Implementasi kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang penertiban hewan lepas, dilihat dari segi (1).perencanaan sudah dilakukan oleh pemerintah dimasing-masing desa yang ada di Kecamatan Bone Raya, adapun (2).pelaksanaan sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa belum efektif kebijakan desa dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum mengindahkan harapan kebijakan. Berikut peneliti melihat dari hasil (3).evaluasi belum keseluruhan desa yang menerapkan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan belum efektif diterapkan oleh masyarakat desa.
2. Faktor yang menentukan implementasi kebijakan peneliti melihat dari bentuk (1).komunikasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan masyarakat sudah dibangun dengan baik. Adapun (2).sumber daya yang menjadi faktor penentu implementasi kebijakan yakni sumber daya manusia yang sudah diberikan tanggung jawab oleh kepala desa dalam menanagani hewan ternak yang berkeliaran dalam hal ini mengawal kebijakan desa yang sudah disepakati hanya ada di beberapa desa, sebab desa lainnya masih tahap

perencanaan. (3). Disposisi menjadi salah satu faktor pendukung karena aparat desa dan masyarakat yang sudah masuk dalam Tim Satuan tugas (SATGAS) sudah dibekali dengan pengetahuan terkait harapan dari kebijakan tentang penertiban hewan lepas. Adapun (4). Struktur birokrasi dilihat dari segi struktur tim satgas sudah dibuat oleh pemerintah desa hanya saja beberapa desa belum melakukan hal yang sama.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa kesimpulan yang ada, maka peneliti memberikan beberapa saran penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penertiban hewan lepas:

1. Bagi pemerintah Kecamatan dan Pemerintah desa dalam membuat kebijakan perlu adanya penegasan dalam pelaksanaan terkait dengan masyarakat yang masih melanggar kebijakan yang sudah disepakati, perlu adanya sikap konsisten secara kelembagaan desa dalam pelaksanaan kebijakan sehingga masyarakat juga tidak terbawa suasana berjalanya waktu kebijakan sudah mulai di abaikan.
2. Bagi masyarakat perlu adanya kesadaran untuk sama-sama ikut aktif dalam membantu pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban hewan lepas dan juga masyarakat yang ikut terlibat dalam tim satuan tugas penanganan hewan lepas bisa membantu bekerja sama dengan aparat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Public Edisi kedua. Selemba Humanika.Jakarta.
- A. G. Subarson, 2005:8. Analisis Kebijakan Public, Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustiono, Leo, 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Public. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Anderson, James E. 1979, Public Policy Making, Hold, Rinehart and Winston, New York, Chapter 1-2 Dan 5.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. Meyakinkan Faliditas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Universitas Negeri Surabaya.Surabaya.
- Fermana, Surya, 2009. Kebijakan Public, Sebuah Tinjaun Filosofis. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Hanifah, Harsono. 2002. Implemetasike Bijakan dan Politik, Jakarta, Rineka Cupta.
- Howlet, Michael Dan Ramens, M (1995), Studying Public Policy:Policy Cycles And Policy Subsystems, Oxford University Press, Toronto, Chapter.
- Indiahono. Dwiyanto, 2009. Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analisis. Gava Madia. Yogyakarta.
- Miles, M. B. & Haberman, 1992. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Nawawi, Handari, (1990). Administrasi Personel Untuk Meningkatkan Produktifitas Kerja, Jakarta: Haji Mas Agung.
- Rakhmat. 2009. Teori Administrasi Kebijakan Dan Manejemen publik. Pustaka Arif. Jakarta.

Santosa, Pandji, 2009. *Administrasi Public: Teori Dan Aplikasi Good Governace*. Rafika Asitama: Bandung.

Setiyawan Guntur, 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*, Afebata: Bandung.

Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Public Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerinta Daerah*. Penerbit Alfabeta: Undang.

Usman Murdin, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, Cv. Sinar Baru.

Jurnal Ilmiah:

Astanto, T., Saleh, C., & Rozikin, M. (2019). Penyusunan Informasi Kinerja dengan Pendekatan Logic Model dalam Perencanaan dan Penganggaran di Ombudsman Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1), 116-125.

Hulinggi, P A, I Sulila, and R Tohopi. 2020. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato." *Jambura Journal of Administrative...* <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjpa/article/download/7320/2315>.

Kau, H. E. P., & Marzaman, A. P. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Layanan Publik Bidang Lingkungan di Provinsi Gorontalo. *Journal of Humanity and Social Justice*, 3(1), 57-80.

Metasari, Y. N., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2021). Implementasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melalui Pelatihan Dan Pembinaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 52-61.

- Mustanir, A. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2).
- Mustanir, Ahmad, and Partisan Abadi. 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Politik Profetik* 5(2): 247–61.
- Muhammadiyah, Jurnal Akuntansi. 2020. "Jurnal Akuntansi Muhammadiyah Edisi : Januari – Juni 2020 VOL. 10 NO. 2." 10(2): 160–72.
- Muhammadiyah, Jurnal Akuntansi. 2020. "Jurnal Akuntansi Muhammadiyah Edisi : Januari – Juni 2020 VOL. 10 NO. 2." 10(2): 160–72.
- Mustanir, Ahmad, and Partisan Abadi. 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Politik Profetik* 5(2): 247–61. Shank, Gregory. 2014. "Social Justice." *Peace Review* 26(4): 520–24.
- Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas Di Kabupaten Bone Bolango
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Qubayla, F., & Jamaluddin, J. (2021). Kajian Implementasi Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Publisitas*, 7(2), 87-101.

Santoso, E. B., Moenek, R., & Nurpahdi, M. (2019). Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 17-32.

Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkoba pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168-176.

Taawoeda, D. (2021). Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang Di Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Politico*, 10(2).

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Perintah Daerah